



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT

Jalan Laksmmana (L) R.E. Martadinata No. 209 Telp. 72388 - 71385 - 78469
Wisselbord 72385 - 72386 - 72387
BANDUNG

Nomor : 1274 /IO2./E.1992
Lamp. : 1 (satu) set
Hal : Pembukaan/Penegerian SMP/SMA
Tahun Pelajaran 1991/1992

5 Juni 1992

Kepada
Yth.

Sdr. Kepala SMP/SMA *Negeri 1*
Likutan
.....
di *Sorang*
.....

Berdasarkan surat Keputusan Mendikbud RI/ No. 0216/O/1992 Tanggal 5 Mei 1992 (Salinan terlampir) perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa SMP/SMA yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan tersebut telah dinyatakan dibuka.

Oleh karena itu kami harap agar pengelola SMP/SMA seperti tercantum pada lampiran I SK tersebut di atas untuk membuat Cap Sekolah, Kepala Surat dan Papan Nama Sekolah sesuai dengan petunjuk pada Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 0144/C/I/Kep/1978 tanggal 8 Desember 1978 dan Surat Edaran Kepala Kanwil Depdikbud Prop - Jabar tanggal 24 Juli 1991 nomor 2379/IO2/J/91 tentang Cap Dinas - (foto Copy terlampir).

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Kepala,

[Signature]
DRS. H. DIDY EDIA KARTADINATA
NIP. 130075074

TEMBUSAN YTH :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Para Kepala Bidang/Bagian di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
4. Para Kepala Kandeptikbud Kab/Kod. di Jawa Barat.



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NO : 0216/0/1992 TANGGAL : 5 MEI 1992

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1992

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/O/1992
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penergerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 226/M Tahun 1986;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
d. Nomor 54/M Tahun 1988.
e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 084/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

- Memperhatikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;
2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penerbitan menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor. 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor. 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :
- | | |
|-------------------------|-------------|
| a. SMP Negeri | 7.830 buah; |
| b. SMA Negeri | 2.141 buah; |
| c. SMIP Negeri | 1 buah; |
| d. SMIK Negeri | 13 buah; |
| e. SMPS Negeri | 14 buah; |
| f. SMEA Negeri | 336 buah; |
| g. SMT Pertanian Negeri | 31 buah. |
- terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 1992
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

tttd

Fuad Hassan

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



REPUB
INDONESIA
M. A. R. d. i. y a h
NIP 130344753

1	2	3	4	5	6	7
		97. SMA Negeri 1 Cikeusai	-	Cikeusai	Kabupaten Serang	09.1.2.1038.23.01.02.5110
		98. SMA Negeri 1 Pabuaran	-	Pabuaran	Kabupaten Serang	09.1.2.1038.23.01.02.5120
		99. SMA Negeri 1 Hanonjaya	-	Hanonjaya	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.01.02.5210
		100. SMA Negeri 1 Indihiang	-	Indihiang	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.01.02.5220
		101. SMA Negeri 1 Pamulang	-	Pamulang	Kabupaten Tangerang	09.1.2.1038.23.01.02.5230
		102. SMP Negeri 4 Serpong	SMP Fuspipitek Serpong	Serpong	Kabupaten Tangerang	09.1.2.1038.23.01.02.5250
						09.1.2.1038.23.01.02.5350

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan

[Signature]

REPOBRI
 H a r d i y a h

NIP. 130344753

Henteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan